INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MUTU DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN

Firanita Putri[1], Triwid Syafarotunnajah[2]
[1,2]Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palangka Raya
[1]firanita.2510130449@uin-palangkaraya.ac.id, [2]triwid.sn@uin-palangkaraya.ac.id

ABSTRACT

National education development planning in Indonesia is arranged in tiers, from long- and medium-term plans to ministry, regional, and education-unit plans, yet coherence across tiers and sectors remains a problem. This article reviews the literature on the integration of national education development planning and its implications for educational quality and equity. A narrative literature review was conducted, including journal articles, an international report, and regulatory documents. Three findings emerge. First, planning integration is both vertical (central, regional, education unit) and horizontal (sector, region, budget). Second, educational inequality is related to the distribution of budgets, teachers, and facilities that has not been aligned with regional planning. Third, educational quality requires data-based planning that links national standards and curricula to local needs. The review recommends stronger cross-tier synchronization and needs-based budget allocation by region.

Keywords: educational planning, national education development, planning integration, educational quality, educational equity

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan pendidikan nasional di Indonesia disusun berjenjang dari rencana jangka panjang dan menengah hingga rencana kementerian, daerah, dan satuan pendidikan, tetapi keterpaduan antarjenjang dan antarsektor masih menjadi persoalan. Artikel ini meninjau literatur tentang integrasi perencanaan pembangunan pendidikan nasional dan implikasinya terhadap mutu dan pemerataan pendidikan. Kajian menggunakan tinjauan literatur naratif yang terdiri atas artikel jurnal, laporan internasional, dan dokumen peraturan. Sintesis menghasilkan tiga temuan. Pertama, integrasi perencanaan bersifat vertikal (pusat, daerah, satuan pendidikan) sekaligus horizontal (sektor, wilayah, anggaran). Kedua, ketimpangan pendidikan berkaitan dengan distribusi anggaran, guru, dan sarana yang belum diselaraskan dengan perencanaan wilayah. Ketiga, mutu pendidikan memerlukan perencanaan berbasis data yang menautkan standar dan kurikulum nasional dengan kebutuhan lokal. Kajian ini menyarankan penguatan sinkronisasi antarjenjang dan alokasi anggaran berbasis kebutuhan wilayah.

Kata Kunci: perencanaan pendidikan, pembangunan pendidikan nasional, integrasi perencanaan, mutu pendidikan, pemerataan pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan nasional Indonesia diarahkan pada penyediaan pendidikan bermutu bagi seluruh warga, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Arah tersebut dijabarkan melalui sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mulai dari rencana jangka panjang (Republik Indonesia, 2024) dan rencana jangka menengah (Republik Indonesia, 2025) hingga rencana strategis kementerian dan rencana pembangunan daerah. Rencana jangka menengah nasional menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga dalam menyusun rencana strategis serta bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan rencana pembangunan daerahnya (Purwaningsih, 2026).

Meskipun kerangkanya berjenjang, hasilnya belum merata. Indonesia telah memperluas akses pendidikan, tetapi pemerataan pembelajaran masih tertinggal, dan ketimpangan mutu mencerminkan kesenjangan kapasitas guru, pembelajaran, infrastruktur, dan tata kelola antardaerah (Rahiem et al., 2026). Di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil, kesenjangan infrastruktur, distribusi guru, dan akses teknologi bahkan disertai implementasi kebijakan yang belum efektif (Sari & Jasiah, 2025). Perbandingan internasional melalui PISA 2022 juga menempatkan kondisi pembelajaran dan ekuitas pendidikan sebagai dua hal yang dipantau bersama (OECD, 2023).

Kajian tentang perencanaan pendidikan Indonesia tersebar pada beberapa sisi: kerangka perencanaan sistem pendidikan (Zakariah et al., 2026), keterkaitan perencanaan daerah dengan pendidikan (Septiana & Salahudin, 2021), distribusi anggaran (Purwaningsih, 2026), dan pemerataan akses (Setiawan et al., 2024). Namun sintesis yang menghubungkan integrasi perencanaan dengan mutu dan pemerataan sekaligus tampak masih terfragmentasi.

Artikel ini bertujuan (1) memetakan bentuk integrasi perencanaan pembangunan pendidikan nasional, (2) menelaah implikasinya terhadap pemerataan pendidikan, dan (3) menelaah implikasinya terhadap mutu pendidikan. Kontribusinya berupa

sintesis konseptual yang dapat dipakai perencana pendidikan di pusat, daerah, dan satuan pendidikan.

B. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan tinjauan literatur naratif sebagaimana dipandu oleh Snyder (2019), yang sesuai untuk menyintesis pengetahuan lintas bidang dan membangun kerangka konseptual. Pertanyaan kajian adalah: bagaimana bentuk integrasi perencanaan pembangunan pendidikan nasional, dan apa implikasinya terhadap pemerataan dan mutu pendidikan.

Penelusuran dilakukan secara literatur melalui jurnal, repositori, dan laman penerbit atau lembaga, menggunakan kata kunci seperti perencanaan pembangunan pendidikan, integrasi perencanaan, pemerataan pendidikan, mutu pendidikan, RPJMN, educational planning, dan educational equity. Sumber yang diambil terkait dengan perencanaan, kebijakan, pemerataan, atau mutu pendidikan di Indonesia, dan memiliki identitas terbitan yang jelas. Skripsi, tesis, dan sumber tanpa identitas terbitan dikeluarkan.

Analisis dilakukan melalui pengodean tematik atas tiga tema, yaitu bentuk integrasi, pemerataan, dan mutu. Keterbatasan metode ini ialah penelusuran yang terbatas pada sumber yang dapat diakses secara terbuka dan penilaian kualitas sumber yang tidak dilakukan secara formal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk Integrasi Perencanaan: dari Rencana Jangka Panjang hingga Satuan Pendidikan

Integrasi perencanaan pendidikan dapat dibaca dalam dua arah. Secara vertikal, rencana jangka panjang dan menengah nasional diturunkan menjadi rencana strategis kementerian, rencana pembangunan daerah, dan rencana satuan pendidikan. Septiana dan Salahudin (2021) menelaah keterkaitan perencanaan pembangunan daerah dengan pendidikan melalui kajian pustaka terstruktur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagai rujukan. Hasanah et al. (2022) menganalisis strategi perencanaan mutu pada satuan pendidikan di lembaga pendidikan Islam, yang memperlihatkan bahwa perencanaan nasional pada akhirnya bermuara pada unit operasional.

Secara horizontal, integrasi berarti menyelaraskan perencanaan sektor pendidikan dengan perencanaan wilayah, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan anggaran. Purwaningsih (2026) mengusulkan peran Bappenas sebagai penata kebijakan (*policy orchestrator*) yang menyelaraskan program pendidikan lintas kementerian dan daerah, serta integrasi data pendidikan dasar, vokasi, dan ketenagakerjaan untuk memetakan kebutuhan sumber daya manusia tiap wilayah. Zakariah et al. (2026) merumuskan empat pilar perencanaan sistem pendidikan, yaitu perencanaan strategis, analisis kebutuhan, perencanaan mutu dan relevansi, serta efisiensi dan pemerataan, dan mencatat pergeseran dari model tersentralisasi menuju desentralisasi dan pendekatan partisipatif. Dengan demikian, integrasi bukan sekadar keselarasan dokumen, melainkan keselarasan data, kewenangan, dan pembiayaan.

2. Implikasi Integrasi terhadap Pemerataan Pendidikan

Bukti kuantitatif menunjukkan bahwa distribusi anggaran perlu terkait dengan perencanaan wilayah. Purwaningsih (2026) menemukan bahwa anggaran pendidikan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah, sedangkan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif terhadap ketimpangan, sehingga peningkatan capaian pendidikan tanpa integrasi dengan transformasi ekonomi wilayah berpotensi memperlebar kesenjangan. Efektivitas anggaran, menurut kajian tersebut, ditentukan oleh desain distribusi, pemanfaatan, dan keterkaitannya dengan perencanaan wilayah, bukan oleh besarannya saja. Sihombing dan Kusuma (2022) mengaitkan ketimpangan pendidikan dengan pendanaan yang tidak merata antardaerah, dan Arief dan Fitranita (2019) memetakan determinan disparitas regional di 34 provinsi sebagai konteks yang lebih luas.

Dari sisi penyelenggaraan, Sandriani dan Riofita (2025) mengidentifikasi tantangan pemerataan pada distribusi guru, kurikulum yang terlalu sentralistik, dan keterbatasan sarana. Setiawan et al. (2024) menegaskan bahwa pemerataan mencakup akses yang setara terhadap pendidikan bermutu,

bukan hanya kesempatan yang sama, sementara Anwar (2022) menilainya dari prinsip pelayanan publik seperti kejelasan informasi, kemudahan akses, dan profesionalisme. Riyadi dan Ghuzini (2021) menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di daerah 3T berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Dari lingkungan UIN Palangka Raya, Sari dan Jasiah (2025) menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada implementasi di lapangan dan menawarkan solusi terintegrasi berupa alat digital luring, model insentif guru, dan program pendidikan berbasis masyarakat, disertai desentralisasi kebijakan dan kemitraan publik-swasta. Sintesisnya, pemerataan tidak cukup dijawab dengan menambah anggaran atau sekolah, tetapi dengan menyelaraskan alokasi guru, sarana, dan dana dengan kebutuhan wilayah.

3. Implikasi Integrasi terhadap Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan bergantung pada seberapa jauh kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam rencana yang sesuai kondisi lokal. Rahiem et al. (2026) memandang ketimpangan mutu sebagai cerminan kesenjangan kapasitas guru, pembelajaran, infrastruktur, dan tata kelola, dan menelaah Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai rancangan kebijakan ex ante yang menuntut langkah terkoordinasi, terintegrasi, dan bertahap dalam perencanaan dan penganggaran. Zakariah et al. (2026) menempatkan perencanaan berbasis data dan analisis kebutuhan sebagai prasyarat perencanaan mutu dan relevansi.

Kebijakan kurikulum memperlihatkan perlunya penerjemahan tersebut. Tinjauan sistematis Jasiah et al. (2024) menyimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka memberi otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah, tetapi menghadirkan tantangan dalam menyeimbangkan pendidikan agama dengan tujuan kurikulum yang lebih luas, sehingga diperlukan pendekatan yang disesuaikan. Pada tingkat satuan pendidikan, pelatihan manajemen akreditasi di Palangka Raya menyoroti manajemen sekolah atau madrasah sebagai satu dari empat komponen penilaian IASP-2020 bersama kualitas lulusan, proses pembelajaran, dan kualitas guru (Gofur et al., 2024). Windasari dan Musyarapah (2026) melaporkan bahwa manajemen peserta didik yang

sistematis dan berbasis nilai Islam berdampak pada lingkungan belajar yang kondusif, kedisiplinan, dan mutu lembaga, sedangkan Rahma et al. (2025) mengkaji pengelolaan Kurikulum Merdeka pada aspek *soft skills* di Palangka Raya sebagai contoh pengelolaan kebijakan nasional di tingkat lokal.

Implikasi praktisnya empat. Pertama, rencana strategis dan rencana pembangunan daerah perlu disinkronkan dengan rencana jangka menengah nasional. Kedua, alokasi anggaran, termasuk dana operasional dan dana alokasi khusus, perlu memakai formula berbasis kebutuhan dan ketimpangan wilayah sebagaimana diusulkan Purwaningsih (2026). Ketiga, data pendidikan perlu terpadu agar perencanaan berbasis bukti. Keempat, perencana di daerah dan satuan pendidikan perlu pendampingan agar standar nasional dapat diterjemahkan secara kontekstual.

D. Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, integrasi perencanaan pembangunan pendidikan nasional bersifat vertikal dan horizontal, mencakup keselarasan data, kewenangan, dan pembiayaan antarjenjang dan antarsektor. Kedua, integrasi berimplikasi pada pemerataan bila distribusi anggaran, guru, dan sarana diselaraskan dengan perencanaan wilayah, bukan sekadar ditingkatkan besarannya. Ketiga, integrasi berimplikasi pada mutu bila standar dan kurikulum nasional diterjemahkan ke dalam rencana yang berbasis data dan sesuai kebutuhan lokal.

Keterbatasan kajian ini ialah sifatnya yang naratif, penelusuran pada sumber terbuka, dan sebagian sumber lokal berupa studi kasus tunggal sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasi. Penelitian lanjutan disarankan berupa analisis empiris antarwaktu terhadap keterkaitan sinkronisasi dokumen perencanaan dengan capaian mutu dan pemerataan, atau tinjauan sistematis dengan protokol yang lebih ketat.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, K. (2022). Implementasi dan relevansi kebijakan dalam pemerataan pendidikan: Studi literatur pelayanan publik. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen, 13*(3), 419–428.

Arief, A. S., & Fitranita, L. (2019). Determinants of regional disparity

in Indonesia: Evidence from 34 provinces. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 20*(2), 168–179. https://doi.org/10.18196/jesp.20.2.5266

Gofur, A., Sapuadi, S., Muzakki, M., & Azhar, M. (2024). Pelatihan manajemen akreditasi sekolah di Kota Palangka Raya. *Pamasa: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, 2*(1), 18–24. https://doi.org/10.20884/1.pamasa.2024.2.1.8864

Hasanah, M., Sandy, P., Mannan, M., & Nasucha, J. A. (2022). Analisis strategi perencanaan mutu satuan pendidikan di lembaga pendidikan Islam di Indonesia. *Attadrib, 5*(2), 108–119.

Jasiah, J., Mazrur, M., Hartati, Z., Rahman, A., Kibtiyah, M., Liadi, F., & Fahmi, F. (2024). Islamic teachers' implementation of the Merdeka Curriculum in senior high schools: A systematic review. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 23*(4), 394–408. https://doi.org/10.26803/ijlter.23.4.21

OECD. (2023). *PISA 2022 results (Volume I): The state of learning and equity in education*. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/53f23881-en

Purwaningsih, M. R. (2026). Distribusi anggaran pendidikan dan dinamika ketimpangan antarwilayah di Indonesia. *Bappenas Working Papers, 9*(1), 130–162. https://doi.org/10.47266/bwp.v9i1.454

Rahiem, M. D. H., Biyanto, & Abduh, M. (2026). Sekolah Nasional Terintegrasi: Peningkatan mutu pendidikan dan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. *Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar, 10*(2), 695–724. https://doi.org/10.67686/didaktika.v10i2.2602

Rahma, T., Sapuadi, S., & Riyadi, S. (2025). Implementation of independent curriculum management on soft skills aspects in Palangka Raya. *Studia Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 7*(1). https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/studiamanageria/issue/view/1202

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*.

Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*.

Riyadi, & Ghuzini, D. (2021). Ketimpangan pendidikan dan pendapatan serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). *Jurnal Kependudukan Indonesia, 16*(2), 139–152.

Sandriani, S., & Riofita, H. (2025). Kebijakan pemerintah dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 9*(2), 15165–15169.

Sari, T. N., & Jasiah, J. (2025). Membangun pendidikan

berkeadilan: Mengatasi masalah pemerataan pendidikan antara daerah dan perkotaan. *Jurnal Pendidikan Indonesia, 6*(4), 1858–1866. https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7661

Septiana, Y., & Salahudin, S. (2021). Perencanaan pembangunan daerah melalui pendidikan: Sebuah kajian pustaka terstruktur (systematic literature review). *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 9*(1), 31–41. https://doi.org/10.21831/jppfa.v9i1.42222

Setiawan, E., Handayani, N., Setiyono, R., Hermansyah, A., Ahmad, A., & Widyatmike, W. (2024). Pemerataan akses pendidikan. *Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial, 2*(4), 29–38.

Sihombing, R. S. T., & Kusuma, N. P. (2022). Pemerataan pendidikan: Studi kasus 34 provinsi di Indonesia. *Parahyangan Economic Development Review, 1*(2), 143–151.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Windasari, W., & Musyarapah, M. (2026). Implementation of student management to improve the quality of Islamic educational institutions. *Jurnal Inovatif Manajemen Pendidikan Islam, 5*(2), 188–197. https://doi.org/10.38073/jimpi.v5i2.4206

Zakariah, F. H. A., Hasunah, U., & Tinus, A. (2026). Perencanaan dan pengembangan sistem pendidikan. *J-SES: Journal of Science, Education and Studies, 5*(1). https://doi.org/10.30651/jses.v5i1.31234